# Hasil Evaluasi Pelaksanaan Undang-Undang No. 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik

Implementasi Inpres No. 7 tahun 2015 tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi

Dalam rangka implementasi Inpres No. 7 tahun 2015 tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, khususnya aksi No. 35 tentang evaluasi pelaksanaan UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP) dimana Kementerian Komunikasi dan Informatika ditunjuk sebagai penanggung jawab, Direktorat Komunikasi Publik yang melaksanakan sosialisasi dan advokasi, telah melakukan pengiriman instrumen kuesioner capaian pelaksanaan UU KIP kepada Kementerian/Lembaga, Partai Politik dan Pemerintah Daerah. Untuk itu disampaikan hasil laporan evaluasi implementasi UU KIP sebagai berikut:

- 1. Pengiriman kuesioner capaian pelaksanaan UU KIP sebanyak 568 kuesioner yang terdiri dari 74 kuesioner yang ditujukan kepada Kementerian/Lembaga, 482 kepada Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota, dan kepada 12 Partai Politik.
- 2. Respon Badan Publik baik di level pusat maupun daerah cukup terlihat dari kuesioner yang diterima sampai dengan 21 Desember 2015 sebanyak 128 kuesioner (22.5% dari total kuesioner yang dikirimkan) yang terdiri dari:
  - a. Berdasarkan jenis Badan Publik

No.	Badan Publik	Jumlah Kuesioner yang Dikirim	Jumlah Kuesioner yang Diterima	%
1	Kementerian	34	16	47.1%
2	Lembaga	40	19	47.5%
3	Pemprov	33	6	18.2%
4	Pemkot	88	19	21.6%
5	Pemkab	361	58	16.1%
6	Partai	12	10	83.3%
	Total	568	128	22.5%

#### b. Berdasarkan area Badan Publik

No.	Provinsi/Pusat	Jumlah Kuesioner yang Dikirim	Jumlah Kuesioner yang Diterima	%
1	Aceh	24	5	20.8%
2	Bali	10	2	20.0%
3	Bangka Belitung	9	3	33.3%
4	Banten	8	2	25.0%
5	DI Yogyakarta	6	2	33.3%
6	DKI Jakarta	7	2	28.6%
7	Jawa Barat	27	11	40.7%
8	Jawa Tengah	36	12	33.3%
9	Jawa Timur	39	10	25.6%
10	Kalimantan Barat	14	2	14.3%
11	Kalimantan Selatan	14	2	14.3%
12	Kalimantan Tengah	15	1	6.7%
13	Kalimantan Timur	14	3	21.4%
14	Kepulauan Riau	7	2	28.6%
15	Lampung	12	1	8.3%
16	NTB	10	2	20.0%
17	NTT	18	1	5.6%
18	Papua	21	1	4.8%
19	Sulawesi Selatan	24	1	4.2%
20	Sulawesi Barat	6	1	16.7%
21	Sulawesi Tengah	11	1	9.1%
22	Sumatera Barat	20	7	35.0%
23	Sumatera Selatan	15	3	20.0%

No.	Provinsi/Pusat	Jumlah Kuesioner yang Dikirim	Jumlah Kuesioner yang Diterima	%
24	Sumatera Utara	26	4	15.4%
25	Pusat*	86	45	52.3%
26	Riau	13	0	0.0%
27	Jambi	11	0	0.0%
28	Bengkulu	10	1	10.0%
29	Sulawesi Utara	11	0	0.0%
30	Sulawesi Tenggara	11	0	0.0%
31	Gorontalo	6	0	0.0%
32	Maluku	9	1	11.1%
33	Maluku Utara	8	0	0.0%
34	Papua Barat	10	0	0.0%
	Total	568	128	22.5%

Keterangan:

\*Pusat: Kementerian/Lembaga/Partai Politik

- 3. Penjabaran hasil instrumen kuesioner capaian pelaksanaan UU KIP yang telah didistribusikan terdiri dari dua variabel yakni:
  - a. Kelembagaan

Variabel kelembagaan menghasilkan kategori baik 7%, kategori cukup 60.2% dan kategori kurang 32.8%. Dimana variabel kelembagaan terdiri dari beberapa indikator sebagai berikut:

#### 1) Regulasi

Indikator regulasi melalui kepemilikan SK PPID, SOP Layanan Informasi Publik dan Daftar Informasi Publik dan Daftar Informasi yang Dikecualikan. Hasilnya yaitu:

- a) Kategori baik 23.4%
- b) Kategori cukup 50.8%
- c) Kategori kurang 25.8%

Pada indikator regulasi, Badan Publik sudah cukup baik dengan adanya kepemilikan SK, SOP dan Daftar Informasi Publik, namun beberapa Badan Publik masih belum memiliki Daftar Informasi yang Dikecualikan.

## 2) Anggaran

Indikator anggaran melalui adanya otonomi dalam mengelola anggaran, adanya anggaran khusus yang disediakan badan publik untuk kegiatan PPID dan adanya standar biaya layanan informasi publik. Hasilnya yaitu:

- a) Kategori baik 7.8%
- b) Kategori cukup 59.4%
- c) Kategori kurang 32.8%

Pada indikator anggaran, Badan Publik sudah cukup baik dengan adanya otonomi dalam mengelola anggaran dan anggaran khusus kegiatan PPID, namun beberapa Badan Publik belum memiliki standar biaya layanan informasi publik.

# 3) Sarana prasarana

Indikator sarana prasarana melalui kepemilikan ruangan PPID tersendiri, adanya papan pengumuman khusus untuk informasi publik, adanya meja layanan untuk pelayanan informasi publik, adanya web resmi PPID, adanya website yang memuat Daftar Informasi Publik, adanya website yang memuat daftar informasi yang dikecualikan dan sarana prasarana penunjang lainnya. Hasilnya yaitu:

- a) Kategori baik 10.2%
- b) Kategori cukup 52.3%
- c) Kategori kurang 37.5%

Pada indikator sarana prasarana, Badan Publik sudah cukup memiliki sarana prasarana yang menunjang walaupun ada beberapa yang tidak memiliki ruangan PPID tersendiri dan berkaitan dengan indikator regulasi masih ada beberapa Badan Publik yang belum menampilkan daftar informasi yang

dikecualikan pada website karena memang belum memiliki daftar informasi yang dikecualikan.

#### 4) SDM

Indikator SDM melalui adanya struktur organisasi PPID, adanya petugas khusus layanan informasi publik dan adanya pelatihan petugas layanan informasi publik. Hasilnya yaitu:

- a) Kategori baik 19.5%
- b) Kategori cukup 58.6%
- c) Kategori kurang 21.9%

Pada indikator SDM, Badan Publik sudah cukup dengan memiliki petugas khusus layanan informasi publik dan adanya struktur organisasi PPID, namun beberapa Badan Publik masih kurang dalam pelatihan/bimtek petugas layanan informasi publik.

b. Pengelolaan, pelayanan dan pelaporan informasi publik.

Variabel pengelolaan, pelayanan dan pelaporan informasi publik menghasilkan kategori baik 7%, kategori cukup 46.9% dan kategori kurang 46.1%. Dimana variabel pengelolaan, pelayanan dan pelaporan informasi publik terdiri dari beberapa indikator sebagai berikut:

1) Pembaruan informasi publik

Indikator pembaruan informasi publik melalui ada tidaknya pemutakhiran informasi publik minimal 1 kali per tahun. Hasilnya yaitu:

- a) Kategori baik 0.8%
- b) Kategori cukup 18%
- c) Kategori kurang 81.3%
- 2) Koordinasi pengumpulan informasi publik dari setiap unit/satuan kerja Indikator koordinasi pengumpulan informasi publik dari setiap unit/satuan kerja melalui adanya rapat antar satuan kerja/PPID pembantu dilaksanakan minimal 1 kali per tahun atau lebih. Hasilnya yaitu:
  - a) Kategori baik 5.5%
  - b) Kategori cukup 50%
  - c) Kategori kurang 44.5%

Badan Publik sudah cukup melakukan koordinasi dengan melakukan rapat antar satuan kerja minimal 1 kali per tahun dalam rangka mengumpulkan informasi publik.

3) Pengelolaan tanggapan atas keberatan yang diajukan pemohon informasi publik

Indikator pengelolaan tanggapan atas keberatan yang diajukan pemohon informasi publik melalui adanya form permohonan dan keberatan dan ketersediaan arsip salinan jawaban badan publik menolak atau menerima permohonan informasi. Hasilnya yaitu:

- a) Kategori baik 9.4%
- b) Kategori cukup 53.1%
- c) Kategori kurang 37.5%

Badan Publik telah memiliki form permohonan/keberatan beserta dengan arsip salinan jawaban baik menolak atau menerima permohonan informasi.

4) Evaluasi dan pengawasan

Indikator evaluasi dan pengawasan melalui adanya laporan berkala dari satuan kerja/PPID pembantu maupun monitoring laporan berkala tersebut. Hasilnya yaitu:

- a) Kategori baik 3.9%
- b) Kategori cukup 28.1%
- c) Kategori kurang 68%

Badan Publik masih kurang dalam melakukan evaluasi melalui pembuatan laporan dan monitoring berkala dari satuan kerja/PPID pembantu.

5) Sistem informasi dan dokumentasi pengelolaan informasi publik

Indikator sistem informasi dan dokumentasi pengelolaan informasi publik melalui ketersediaan arsip informasi dalam berbagai bentuk (hardcopy/softcopy) dan daftar informasi yang dikuasai oleh satuan kerja/PPID pembantu. Hasilnya yaitu:

- a) Kategori baik 5.5%
- b) Kategori cukup 61.7%
- c) Kategori kurang 32.8%

Badan Publik memiliki arsip informasi yang disediakan juga memiliki daftar informasi yang dikuasai oleh satuan kerja/PPID Pembantu.

6) Informasi yang wajib diumumkan secara berkala

Indikator informasi yang wajib diumumkan secara berkala melalui adanya informasi tentang badan publik termasuk LHKPN, adanya ringkasan informasi program/kegiatan, adanya narasi realisasi kegiatan, adanya ringkasan laporan keuangan, ringkasan laporan akses informasi publik yang memuat jumlah permohonan serta informasi yang wajib diumumkan secara berkala lainnya. Hasilnya yaitu:

- a) Kategori baik 11.7%
- b) Kategori cukup 55.5%
- c) Kategori kurang 32.8%

Badan Publik cukup dalam memberi informasi yang wajib diumumkan secara berkala.

7) Informasi yang wajib diumumkan serta merta

Indikator informasi yang wajib diumumkan serta merta melalui adanya standar pengumuman informasi serta merta, adanya informasi prosedur dini dan prosedur evakuasi keadaan darurat dan pengumuman keadaan darurat. Hasilnya yaitu:

- a) Kategori baik 5.5%
- b) Kategori cukup 53.1%
- c) Kategori kurang 41.4%

Badan Publik cukup dalam memberi informasi yang wajib diumumkan serta merta walaupun belum ada standar pengumuman informasi serta merta.

8) Informasi yang wajib tersedia setiap saat

Indikator informasi yang wajib tersedia setiap saat melalui adanya informasi tentang peraturan, keputusan dan kebijakan publik, adanya informasi lengkap yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala, adanya informasi tentang organisasi, administrasi, kepegawaian dan keuangan, serta informasi yang wajib tersedia setiap saat lainnya. Hasilnya yaitu:

- a) Kategori baik 7.8%
- b) Kategori cukup 50.8%
- c) Kategori kurang 41.4%

Badan Publik cukup dalam memberi informasi yang wajib tersedia setiap saat, namun ada beberapa Badan Publik yang belum ada informasi mengenai jumlah/jenis pelanggaran yang ditemukan dalam pengawasan internal ataupun pelanggaran yang dilaporkan masyarakat.

9) Permintaan informasi

Indikator permintaan informasi melalui adanya pendataan mengenai permintaan informasi yang diajukan, adanya data jumlah permintaan yang masuk, telah terlayani, dalam proses dan ditolak. Hasilnya yaitu:

- a) Kategori baik 23.4%
- b) Kategori cukup 30.5%
- c) Kategori kurang 46.1%

Badan Publik masih kurang dalam melakukan pendataan permintaan informasi yang diajukan ke PPID seperti jumlah permintaan yang masuk, telah dilayani, dalam proses ataupun permintaan yang ditolak.

10) Sengketa informasi

Indikator sengketa informasi melalui adanya pendataan mengenai sengketa informasi, jumlah sengketa yang terjadi, dalam proses dan sudah selesai. Hasilnya yaitu:

- a) Kategori baik 10.9%
- b) Kategori cukup 22.7%
- c) Kategori kurang 66.4%

Badan Publik masih kurang dalam melakukan pendataan jumlah sengketa informasi yang terjadi, dalam proses maupun yang sudah selesai.

### 11) Laporan pelayanan informasi publik

Indikator laporan pelayanan informasi publik melalui adanya laporan pelayanan informasi publik beserta lampiran dan disampaikan atau tidaknya kepada Komisi Informasi Pusat. Hasilnya yaitu:

- a) Kategori cukup 13.3%
- b) Kategori kurang 86.7%

Badan Publik masih kurang dalam membuat laporan pelayanan informasi publik yang tersedia dengan lampiran.

- 4. Hambatan dan kendala yang dihadapi dalam evaluasi implementasi UU KIP yaitu dalam hal pengumpulan instrumen kuesioner dari Badan Publik walaupun sudah dilakukan konfirmasi untuk pengembalian instrumen kuesioner, namun sampai saat ini masih banyak instrumen yang belum diterima.
- 5. Kesimpulan dan Rekomendasi

Data ini memberikan gambaran akan implementasi UU KIP. Terlihat dalam pelaksanaannya sebagian besar masuk ke dalam kategori cukup, antara lain sudah adanya regulasi, anggaran untuk pelayanan informasi publik, tersedianya sarana prasarana dan SDM. Namun ada beberapa indikator yang masuk dalam kategori kurang, antara lain masih minimnya evaluasi dan pengawasan melalui pembuatan laporan berkala, pendataan permintaan ataupun sengketa informasi serta pembuatan laporan pelayanan informasi publik yang disampaikan kepada Komisi Informasi Pusat.

Rekomendasi yang dapat diberikan yaitu diperlukannya bimbingan teknis terkait pembuatan laporan baik laporan berkala, standar pendataan permintaan atau sengketa informasi maupun laporan pelayanan informasi publik.